

**IMPLEMENTASI PROGRAM “SABILULUNGAN”
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA
DAIAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK
DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Abdurohim

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

AbstrAct

Sabilulungan Community Empowerment Program Village Raksa is a program of Bandung Regency Government is intended to improve the quality of physical infrastructure development through the active participation of government and community in the implementation of development in the village and utilize local resources independently. This program has been implemented by all villages in Bandung regency. Cileunyi Kulon Village is one of the targeted areas of Sabilulungan Community Empowerment Program of Raksa Desa especially in increasing the physical development in the area of the village. The purpose of this observation is to know how the implementation of Sabilulungan Village Community Empowerment Sabilulungan program, the factors that encourage and inhibit the implementation of the program, as well as government efforts in following up the inhibiting factors. The research method used is Descriptive research method with inductive approach. The data collection techniques used in the study are Observation, Interview, and Documentation. Implementation Sabilulungan Community Empowerment Program Village Raksa In Improving Physical Development In Cileunyi Kulon Village Cileunyi District Bandung Regency is one of government efforts in improving people's welfare, especially in the field of physical prasarana development. The results of observations that the authors do that the implementation of programs conducted by the village head cileunyi kulon is good enough, but still experiencing various obstacles. Inhibiting factors that occur include the problem: the budget is still minimal, and disbursements are divided into two stages resulting in inhibition of the program.

The suggestion to be conveyed by the author in an effort to overcome these obstacles is increasing the budget to Sabilulungan Community Empowerment Program Village Raksa, facilitate the process of disbursement of funds and improve the performance of village officials.

Keywords: *impact, policy, development*

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan nasional di Indonesia yaitu menciptakan keadilan,

kesejahteraan, dan kemandirian untuk seluruh rakyat. Hal tersebut diperlukan guna menghadapi tantangan zaman di

era globalisasi yang meluas di setiap aspek kehidupan. Setiap individu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemampuan tersebut merupakan modal utama yang harus dipenuhi, utamanya karena pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.

Konsep otonomi daerah dibuat agar daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, bahwa pemerintah daerah juga berfungsi dalam memprakarsai pembangunan di daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat pembangunan adalah transformasi atau perubahan dari suatu kondisi tertentu menuju suatu kondisi yang lebih baik. Konteks kesejahteraan sosial pembangunan berarti upaya untuk memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program pembangunan harus diupayakan sampai ketinggian yang paling rendah. Sehingga peran pemerintah desa yang merupakan lini terdepan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai program dalam rangka peningkatan pembangunan fisik telah dilaksanakan pemerintah. Namun dalam kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya tidak tepat sasaran, melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat, seperti nilai-nilai kegotong-royongan,

kepedulian, musyawarah dan keswadayaan. Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalan mereka secara bersama.

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.767,96 KM². Terbagi dalam 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan (www.bandungkab.bps.go.id). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah perdesaan yang pada zaman dahulu lingkungannya sangat asri. Bupati Bandung Dadang M. Naser S.H., M.Ip dalam (www.soreang-online.com) mengakui bahwa masih banyak permasalahan kompleks yang terjadi di perdesaan. Masalah tersebut terkait dengan sarana dan prasarana baik pribadi masyarakat maupun umum. Masalah diantaranya:

- a. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni
- b. Kurangnya ketersediaan air bersih
- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sistem sanitasi atau saluran pembuangan (MCK) yang baik
- d. Masih banyaknya masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS) baik itu di sungai, kebun dan lain-lain
- e. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di perdesaan
- f. Berubahnya kondisi alam lingkungan desa yang tadinya asri menjadi tidak sehat

Permasalahan tersebut diperlukan upaya dari pemerintah daerah dengan

masyarakat untuk mengatasinya melalui peningkatan pembangunan perdesaan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdesaan baik secara individu maupun umum.

Hal tersebut berkaitan juga dengan salah satu 9 agenda prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo atau yang lebih dikenal konsep Nawa Cita. Pada poin ketiga Menyatakan bahwa "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" (www.kompas.com) Oleh karena itu desa berperan penting dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar oleh pemerintah bersama-sama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, desa menjadi perhatian penting.

Pembangunan desa harus dilaksanakan sebagaimana pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembangunan harus dilakukan secara terencana serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara melalui program-program yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung memposisikan pembangunan desa sebagai ujung tombak. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung yaitu yang salah satu misinya adalah memantapkan pembangunan perdesaan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fisik perlu adanya pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Melalui program bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat

memperbaiki permasalahan kompleks yang ada di perdesaan. Sejak tahun 2010 lalu Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk suatu program bantuan keuangan kepada desa yaitu Program Pembangunan Desa (P2D), kemudian pada tahun 2012 program tersebut dirubah menjadi Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dan di tahun 2015 program P4 dihapuskan kemudian berubah nama menjadi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Dalam bahasa Sunda Raksa berarti menjaga dan memelihara. Namun secara akronim kata Raksa merupakan singkatan dari Rumah, Air, Kakus, Sampah dan Alam.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa "Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa adalah kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik di perdesaan di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber pembangunan secara optimal.
- b. Untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas sarana desa melalui peran serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan

sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.

- c. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam menambah pendapatan masyarakat

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kualitas pembangunan bidang prasarana fisik melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri

Masalah lain adalah rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat Kabupaten Bandung dengan kebijakan dan program-program yang dibuat pemerintah untuk Kabupaten Bandung yang lebih baik. Masyarakat memiliki sikap tidak peduli terhadap program pemerintah, dan kebanyakan masyarakat desa masih pasrah akan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan selama masyarakat tidak merasa dirugikan hal ini terjadi khususnya di desa. Kurangnya partisipasi ini juga dapat disebabkan dengan tingginya rasa ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik, akan mengurangi kreativitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menimbulkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri dan menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Masyarakat yang kurang berpartisipasi dan terlalu bergantung kepada pemerintah dapat menghambat perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Raksa Desa adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan kawasan kumuh di desa-desa di Kabupaten Bandung dengan prioritas mendukung program pemerintah untuk menjadikan Bandung asri kembali dan penghidupan yang layak dan sehat berupa ketersediaan fasilitas mandi, cuci, kakus serta rumah layak huni.

Desa Cileunyi Kulon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cileunyi di wilayah Kabupaten Bandung. Desa ini mempunyai luas 489,174 Ha, yang terdiri dari 8 dusun, 26 Rukun Warga (RW), dan 121 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 26.698 orang (www.bandungkab.bps.go.id). Masyarakat Desa Cileunyi Kulon belum seluruhnya memiliki rumah yang layak huni serta fasilitas sanitasi yang baik. Selain itu ketika musim kemarau masyarakat kesulitan untuk memperoleh air bersih karena jumlah sarana air bersih umum yang sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Rumah tidak Layak Huni dan Sarana Air Bersih Umum Desa Cileunyi Kulon

No.	Fasilitas	Tahun	
		2016	2017
1.	Rumah tidak Layak Huni	129	124
2.	Belum Dilengkapi Sanitasi yang Baik	140	139
3.	Sarana Air Bersih Umum	0	2

Sumber: *Desa Cileunyi Kulon*

Mengingat Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

dilaksanakan di setiap desa di Kabupaten Bandung, termasuk Desa Cileunyi Kulon. Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon memfokuskan pembangunan fisik pada peningkatan sarana dan prasarana yang layak untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari penjabaran dan latar belakang inilah ketertarikan penulis untuk mengetahui dan membahas “Impelementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dikarenakan dalam kegiatan magang ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat menyampaikan gambaran berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan lengkap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menekankan pada kondisi yang terjadi di suatu daerah atau lokus yang akan diteliti. Metode-metode dalam penelitian kualitatif bisa berupa wawancara kepada informan

terkait implementasi program Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon, pengamatan implementasi program Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon, dokumentasi bagaimana implementasi program Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon, serta berbagai macam metode yang digunakan sesuai dengan apa yang akan diteliti. Untuk mendapat informasi yang diinginkan, maka penulis harus terjun langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik yang digabungkan menjadi satu dan analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang akan terjadi di lapangan yang kemudian akan diproses menjadi satu hipotesis atau teori.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Sejalan dengan hal tersebut Silalahi dalam bukunya *Metode Penelitian* (2012:27) menyatakan bahwa:

Penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangannya, meskipun hal ini dapat bervariasi. Pentingnya penelitian deskriptif sangat jelas menonjol dalam ilmu-ilmu sosial. Dari penelitian deskriptif, terutama bagi ilmu-ilmu sosial, banyak *imponderabilie* (hal-hal yang nampaknya tidak penting tetapi yang pada hakikatnya sangat berperan seperti nilai-nilai dan sebagainya) dan

kehidupan sosial sehari-hari dapat dideskripsikan, yang tidak muncul dalam suatu penelitian eksplanasi. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Banyak temuan penelitian sosial dalam jurnal digunakan untuk membuat putusan kebijakan adalah deskriptif

Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan yang ada di lapangan saat ini secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan antara fenomena yang diselidiki pada suatu masyarakat atau kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian di atas melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan umum yang berangkat atau bertumpu dari fakta-fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pada kegiatan magang ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis melalui tiga teknik yaitu :

- **Observasi**

Penulis akan melakukan pengamatan bagaimana implementasi program Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah

penelitian. Hal-hal yang akan diobservasi antara lain:

1. Rumah Tidak Layak Huni
2. Kondisi fasilitas MCK
3. Kondisi sarana air bersih umum
4. Irigasi/Drainase

- **Wawancara**

Penulis berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan penulis akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru sampai penulis merasa data yang dibutuhkan telah lengkap terkumpul. Jadi, dalam penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur bertujuan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Penulis juga menyiapkan item-item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber/informan.

Informan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan yang terjadi. Dalam teknik ini informan yang dipilih ialah informan memiliki tugas dan fungsi serta pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan penulis. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
2. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

3. Camat Cileunyi
4. Kepala Desa Cileunyi Kulon
5. Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cileunyi Kulon
7. Masyarakat di Desa Cileunyi Kulon yang menerima bantuan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

- **Dokumentasi**

Sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data, dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam rangka melengkapi data dan informasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, melalui berbagai macam dokumen, baik resmi maupun tidak resmi. Melakukan dokumentasi perlu diperhatikan penggunaan dokumen yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339-341) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”

- **reduksi Data**

Silalahi (2012:339) mengemukakan bahwa “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”.

Artinya proses reduksi berlangsung selama penelitian. Data ataupun laporan yang didapat dari lapangan perlu direduksi dan diubah untuk membuatnya lebih mudah diakses dan dimengerti. Data yang diperoleh kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Maka data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

- **Penyajian Data**

Menurut Silalahi (2012:340) Bahwa “Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penyajian data dapat membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang tepat dan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

- **Verifikasi**

Menurut Silalahi (2012:341) “Singkatnya verifikasi adalah makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya”.

Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti yang di atas kemudian dilanjutkan dengan langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data. Dari tahap analisis data di atas, saling berhubungan dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Proses pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 yaitu melalui beberapa proses, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Bab V Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan mengenai mekanisme perencanaan. Perencanaan itu sendiri terdiri pada tiga tingkatan yaitu perencanaan di tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Untuk perencanaan di tingkat desa menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, anggota BPD, perangkat memberitahukan/mengumumkan besaran dan penggunaan alokasi dana kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;

2. Agenda Musyawarah Desa terdiri dari:

- a. Memberitahukan/ mengumumkan alokasi dana kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang diterima oleh desa;
- b. Menyusun dan menetapkan TPKD;
- c. Menyusun dan menetapkan pelaksana teknis untuk masing-masing kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada TPKD.
- d. Usulan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris DPMD Kabupaten Bandung: “Dana untuk PSPM Raksa Desa ditentukan sesuai dengan hasil SK Bupati tentang pengalokasian dana PSPM Raksa Desa. Mulai tahun 2016 dana PSPM Raksa Desa dipisahkan dengan dana Reses Dewan. Sehingga rata-rata jumlah dana yang diterima oleh desa berkisar Rp.50.000.000.”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Camat Cileunyi, Bapak Yayan Suheryan mengenai hal tersebut

Proses perencanaan di tingkat kecamatan diawali dengan menyusun rencana kegiatan Tim Pembina Kegiatan, lalu melaksanakan verifikasi

administrasi dan kesuaian lokasi sasaran kegiatan PSPM Raksa Desa serta memberikan bimbingan teknis tentang pelaksanaan kegiatan PSPM Raksa Desa.

Sedangkan di tingkat kabupaten menurut Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Ibu Rohmiasih, M.Si.

Setelah semua hasil perencanaan diterima dari tiap kecamatan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan. Selain itu Tim Pembina Kabupaten membahas pelaksanaan sosialisasi program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Setelah itu menghimpun dan menyusun usulan kegiatan dari Pemerintah Desa melalui Camat untuk dibuatkan penetapan sasaran kegiatan.

Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung: “Pembiayaan PSPM Raksa Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung, mengenai jumlah dana nya dituangkan dalam Keputusan Bupati. Setiap desa di Kabupaten Bandung rata-rata menerima Rp.50.000.000.”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Ibu Rohmiasih, M.Si : “Program ini dibiayai oleh APBN Kabupaten Bandung, pemberian dana dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Pemerintah Desa. Sehingga proses pemberian dana langsung dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa.”

Dari hasil wawancara di atas penulis mengamati bahwa proses pendanaan telah berjalan secara transparan dan simpel. Karena Pemerintah Desa langsung menerima dana yang diberikan.

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dimulai dari tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat kecamatan, pada akhirnya di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Drs. Bambang Sukmawijaya, M.Si :

Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan. Selanjutnya menetapkan sasaran kegiatan dengan keputusan bupati, setelah itu mencairkan dana yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati kepada pemerintah desa. Setelah dana dicairkan proses pengendalian PSPM Raksa Desa dilakukan agar program terlaksana dengan baik.

Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung menjelaskan

proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sesuai hasil wawancara dengan penulis:

Semua proses pelaksanaan diawali dengan tahap sosialisasi dengan pihak dari Desa dan Kecamatan. Selanjutnya kami menghimpun aspirasi masyarakat yang ingin dibantu dan menetapkan target sasaran yang ingin dibantu atau dicapai. Setelah hasil penetapan final, maka dibuatkan keputusan bupati guna pencairan dana yang akan diberikan. Setelah dana cair, semua proses pelaksanaan program ini kami pantau dan minta laporan kegiatannya secara berkala.

Penulis menilai bahwa proses pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017, hal tersebut senada dengan hasil wawancara di atas serta hasil pengamatan penulis.

Tabel 2

Kegiatan Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi	Nilai Bantuan (Rp)
1	SPAL Kp. Galumpit RW 17	100 %	10.000.000,
2	Perbaikan Rumah Sehat Nugraha RT 01/06	100 %	10.000.000,
3	Perbaikan Rumah Sehat Ibu Iroh RT 02/04	100 %	10.000.000,
4	Perbaikan rumah Sehat Bapak Tatang RT 03/23	100 %	10.000.000,
5	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Deni Sundana RT 02/15	100 %	10.000.000,
JUMLAH			50.000.000,-

Sumber: APBDes Cileunyi Kulon Tahun 2017

Analisis Fokus Magang dari Perspektif Teoritis

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Analisis konsep implementasi kebijakan yang digunakan penulis yaitu menurut Edward III sebagai berikut:

- **Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di

samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipasakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

- ***sosialisasi Program***

Sosialisasi adalah proses pemberian informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran program kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang diberikan.

Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Cileunyi mengatakan bahwa:

Kegiatan sosialisasi dilakukan jauh sebelum kegiatan raksa desa dilaksanakan, sosialisasi program dilakukan di berbagai acara kemasyarakatan. Kami mengumpulkan masyarakat dalam suatu rapat dengan tujuan mencari tahu seluruh permasalahan yang ada untuk selanjutnya dianggarkan dalam program raksa desa.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Cileunyi Kulon mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan melalui setiap tokoh masyarakat dan tokoh agama di setiap lingkungan. Dasar dari sosialisasi itu sendiri sekaligus untuk mengetahui keinginan dan aspirasi masyarakat.”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ketua LPMD mengatakan sebagai berikut:

“Sosialisasi dilakukan lewat setiap kepala dusun dan kepala RW untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Kami memberikan tanggung jawab kepada kepala dusun dan kepala RW.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nugraha warga RT.01/06 mengatakan bahwa:

“Petugas dari desa datang menemui saya menjelaskan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk merenovasi rumah agar layak huni, namun bantuan tersebut diberikan dalam 2 tahap”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Iroh warga RT.02/04 mengatakan bahwa

“Ada informasi dari desa mengenai program raksa desa serta dijelaskan bagaimana tahapan untuk mendapat bantuan dari program tersebut. Saya tertarik untuk memperolehnya, karena saya sangat membutuhkan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tatang warga RT.03/23 mengatakan bahwa

“Awalnya Pak RW datang untuk menjelaskan mengenai program raksa desa, setelah itu dari desa datang juga untuk menjelaskan program tersebut yang diwakili oleh LPMD.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Deni Sundana warga RT.02/15 mengatakan bahwa

“Sosialisasi dilakukan oleh aparat desa, yaitu dengan menjelaskan apa itu raksa desa serta bagaimana tahapan pemberian bantuan melalui program tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi telah dilakukan cukup baik kepada masyarakat lewat setiap kepala dusun, kepala RW, dan tokoh masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan aspirasi mengenai permasalahan yang ada.

- ***Koordinasi Antar Pihak***

Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang lain. Koordinasi bertujuan untuk menciptakan

dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Cileunyi mengatakan bahwa

“Koordinasi dari tiap lini telah berjalan dengan baik, setiap desa di Kecamatan Cileunyi termasuk Desa Cileunyi Kulon selalu berkoordinasi dengan kecamatan melalui kepala desa dan LPMD dalam melaksanakan program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Cileunyi Kulon mengatakan bahwa

“Koordinasi telah berjalan dengan baik dimana pihak LPMD selalu melaporkan rencana juga hasil kegiatan yang dilakukan dalam rapat.”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ketua LPMD mengatakan sebagai berikut

“Koordinasi dilakukan dengan memanggil ketua RW yang akan mendapatkan bantuan ke Desa, sehingga koordinasi berjalan dengan baik”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan baik, setiap pihak terkait saling berkoordinasi guna melaksanakan program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa.

- ***sumber Daya***

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah aparatur, keahlian dari para

pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplemetasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat_diarahkan kepada sebagaimana yang diaharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Dalam hal sumberdaya, tentunya terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat langsung dari gejala-gejala yang ada. Maka dari itu penulis mengambil beberapa aspek sebagai dasar untuk wawancara dengan informasi terkait, diantaranya: (1) staf, (2) anggaran, dan (3) wewenang.

- ***Disposisi***

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikapimplementor. Jikaimplementorsetuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program

dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

- ***sikap Pelaksana***

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

- ***struktur birokrasi***

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan maka diketahui beberapa faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

• **Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat, diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa aparat desa yang berpendidikan rendah dalam menjalankan PSPM Raksa Desa.
2. Keterlambatan Sosialisasi Dasar Hukum untuk implementasi PSPM Raksa Desa.
3. Tingginya permintaan bantuan dari masyarakat tidak seimbang dengan bantuan yang disediakan pemerintah. Sehingga adanya konflik pada saat penentuan pihak yang akan menerima bantuan.
4. Jumlah dana yang diberikan kurang sesuai dengan program yang dilaksanakan.

5. Tahap pencairan dana dilakukan dalam dua tahap.

• **Faktor Pendukung**

Selain faktor penghambat terdapat juga faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa, diantaranya:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung sangat mendukung pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan masih dilanjutkannya program ini dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bandung untuk pembiayaannya hingga saat ini.
2. Cukup tingginya partisipasi masyarakat juga turut membantu dalam melaksanakan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bentuk partisipasinya berwujud tenaga, pikiran, uang, serta bahan material.
3. Koordinasi tiap pihak terkait berjalan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa tidak terjadi salah komunikasi.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi faktor penghambat yang ada. Upaya yang dimaksud di antaranya:

1. Meningkatkan kinerja aparat desa dalam mendorong masyarakatnya untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mensukseskan program ini.
2. Melaksanakan pembinaan kepada aparat desa tentang PSPM Raksa Desa, agar pengetahuan yang dimiliki aparat desa bertambah sehingga aparat desa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Memfasilitasi masyarakat penerima untuk menambah dana yang dinilai masih kurang.
5. Pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara langsung, melainkan menunggu semua dana didapat hingga tahap kedua.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah dilakukannya proses analisis pada bab sebelumnya sehubungan dengan pembahasan Implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi

dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait jumlah dana dan proses pencairan anggaran dan dapat diketahui bahwa:

a. Komunikasi

Proses komunikasi mengenai Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik antar pihak penyelenggara khususnya kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa Cileunyi Kulon sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mengenai permasalahan yang ada.

b. Sumber daya

Sumber daya di Desa Cileunyi Kulon sudah dapat menunjang Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik.

Tingkat pendidikan aparatur desa yang rendah menjadi salah satu kendala

c. Disposisi

Masyarakat cukup antusias terhadap Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik hal tersebut ditandai dengan dukungan masyarakat dalam bentuk tenaga, dana dan pikiran.

Penyelenggara menyikapi program ini dengan positif. Sehingga setelah program ini dilaksanakan, terjadi peningkatan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon.

d. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas sudah berjalan dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang terdapat dalam terealisasinya program yang telah dibuat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik antara lain:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat mendukung pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan masih dilanjutkannya program ini dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bandung untuk pembiayaannya hingga saat ini.

Cukup tingginya partisipasi masyarakat juga turut membantu dalam melaksanakan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bentuk partisipasinya berwujud tenaga, pikiran, uang, serta bahan material.

Koordinasi tiap pihak terkait berjalan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa tidak terjadi salah komunikasi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa antara lain:

Masih terdapat beberapa aparat desa yang berpendidikan rendah dalam menjalankan PSPM Raksa Desa.

Keterlambatan Pembuatan Dasar Hukum untuk implementasi PSPM Raksa Desa.

Tingginya permintaan bantuan dari masyarakat tidak seimbang dengan bantuan yang disediakan pemerintah. Sehingga adanya konflik pada saat penentuan pihak yang akan menerima bantuan.

Jumlah dana yang diberikan kurang sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Tahap pencairan dana dilakukan dalam dua tahap.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cileunyi Kulon dalam mengatasi kendala pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik telah dilakukan melalui beberapa upaya. Upaya-upaya yang dimaksud penulis antara lain:

Meningkatkan kinerja aparat desa dalam mendorong masyarakatnya

untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mensukseskan program ini.

Melaksanakan pembinaan kepada aparat desa tentang PSPM Raksa Desa, agar pengetahuan yang dimiliki aparat desa bertambah sehingga aparat desa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Memfasilitasi masyarakat penerima untuk menambah dana yang dinilai masih kurang.

Pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara langsung, melainkan menunggu semua dana didapat hingga tahap kedua.

Saran

Berdasarkan pengamatan penulis terkait Implementasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cileunyi Kulon, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksana program dituntut menjalankan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Dengan cara itu, kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir.
2. Program yang dijalankan juga dapat tepat sasaran dan tepat jumlah. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung terus mengembangkan inovasi dan menciptakan ide kreatif

sebagaimana hanya ide kreatif dana hibah dan bantuan sosial dalam pemerataan pembangunan di wilayah dengan desa sebagai implementornya.

3. Perlu dilakukan upaya oleh aparat Pemerintah baik oleh aparat kecamatan, kabupaten maupun aparat desa dalam mengatasi faktor yang penghambat antara lain:
 - a. Mempercepat proses pencairan dana dengan cara pencairan langsung dalam 1 tahap agar pembangunan yang berjalan tidak terhambat.
 - b. Meningkatkan kualitas aparat baik dari segi pendidikan, pelatihan dan kesungguhan aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta menambah personil aparat dari tingkat desa hingga kecamatan agar kebutuhan jumlah aparat terpenuhi.
 - c. Harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program, agar kinerja aparat dapat ditingkatkan sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik. Serta tetap memperhatikan tupoksi dan wewenangnya sebagai pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan*

- Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT. Pusaka CIDESINDO
- Limhanas. 1997. *Metodologi Pembangunan Desa.* Jakarta: PT. Binakarsa
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan.* Bandung: Fokusmedia
- Sujarto, Joko. 1996. *Perencanaan Kota Baru.* Bandung: ITB
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: CV. Citra Mulya
- Susiana, S. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.* Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
- Syafri dan Setyoko. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja.* Sumedang: Alqaprint
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Alfabeta
- Theresia, A. Andini. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* Bandung: Alfabeta
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, M.Irwan. 2006. *Prospek Pembangunan Desa.* CV. Bandung: Fokusmedia
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi.* Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung
- Peraturan Desa Cileunyi Kulon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran s2017

Sumber lain

- www.soreang-online.com
www.bandungkab.bps.go.id
www.kompas.com
www.pikiran-rakyat.com